

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCEPATAN PROSES
PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN DENGAN
ALASAN MENGIDAP HIV/ AIDS

A. Analisis Terhadap Landasan Hukum Yang Dipergunakan Hakim

Landasan hukum merupakan tempat sandaran atau dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya. Karena setiap tindakan atau keputusan (kebijakan) yang dilakukan aparaturnya hukum (hakim) dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa bermuara dari sumber-sumber hukum yang jelas.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Karena undang-undang telah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman hukumnya (sanksi) berupa pidana tertentu.

Setelah diduga melakukan perbuatan pidana, undang-undang menuntut kepada terdakwa atau tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam istilah hukum disebut “pertanggungjawaban pidana”. Yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah asas : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi means sir rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis, di Indonesia juga berlaku ini.¹

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 153.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) itu menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan pidana.

Berkenaan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak, hal ini dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan dalam persidangan yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.²

Maka dari itu, adanya hukum pidana formil ini sangat menentukan dalam pelaksanaan hukum pidana materiil. Dalam wilayah hukum pidana, tata cara pelaksanaan pidana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara di Pengadilan Negeri yang telah dibukukan dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet-8, 74.

Sebagaimana telah dijelaskan pada awal-awal bab ini, bahwa acara pemeriksaan persidangan yang diatur dalam KUHAP dibedakan menjadi tiga jenis acara pemeriksaan perkara pada sidang di Pengadilan Negeri, yaitu :³

1. Acara Pemeriksaan Biasa diatur dalam Bagian Ketiga, Bab XVI.
2. Acara Pemeriksaan Singkat diatur dalam Bagian Kelima, Bab XVI.
3. Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Bagian Keenam, Bab XVI yang terdiri dari dua jenis, yakni ;
 - a) Acara Pemeriksaan Pidana Ringan dan,
 - b) Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas.

Dalam Bab XVI KUHAP memang dibedakan acara pemeriksaan perkara sidang di Pengadilan Negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang akan diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”.

Sedang perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “acara singkat” atau “sumir”.⁴ Dan “acara pemeriksaan cepat” seperti yang telah diuraikan di atas, adalah diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 104.

⁴*Ibid*

Memperhatikan dan menimbang pada kasus pencurian yang terjadi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Peruntut Umum menuntut :bahwa terdakwa Hendra Yusanto dan terdakwa Rio Dwi Patra didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :⁵

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barangsiapa**” artinya setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **HendraYusanto** dan **RioDwiPatra** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Gresik No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs.

dan terbukti terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur ini dibuktikan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Susilowati ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para terdakwa sengaja memiliki barang, atau terdakwa bertindak bahwa barang tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna cokelat metalik ukuran M dan sebelumnya adalah

atas kekuasaan terdakwa, kemudian tanpa ijin pemiliknya para terdakwa mengambil barang tersebut dan akan dimiliki serta dijual, padahal para terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Susilowati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi dan para terdakwa ternyata bersesuaian dengan yang lainnya, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna coklat metalik ukuran M milik saksi Susilowati, perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih yaitu dilakukan terdakwa Hendra Yusanto dan terdakwa Rio Dwi Patra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Yahya Harahap⁶ dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” menjelaskan, umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun ke atas diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka yang didakwakan kepada Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana pencurian adalah Pasal 363 Bagian Ke-4 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan Dan Penerapan KUHAP*, hal. 104

dengan bersekutu. Dan telah dinyatakan dalam putusan No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs, bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa telah terpenuhi semuanya, ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 363 KUHP paling lama adalah 7 (tujuh) tahun penjara.

Dengan demikian, ditinjau dari ancaman hukuman dalam kasus pencurian yang dilakukan Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra yakni 7 (tujuh) tahun penjara yaitu pencurian dengan unsur memberatkan karena pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang (Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra) dengan cara bekerja sama (bersekutu), maka berdasarkan ketentuan dalam Bagian Ke – III Bab XIV KUHAP, seharusnya acara pemeriksaan yang diterapkan dalam persidangan tersebut bukan Acara Pemeriksaan Cepat melainkan Acara Pemeriksaan Biasa.

Dari sisi lain telah dijelaskan, bahwa untuk menentukan suatu tindak pidana diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa atau yang lain (Singkat maupun Cepat), dasar titik tolaknya adalah ditinjau dari mudah atau sulitnya proses pembuktian dalam perkara pidana tersebut. Di antara pertimbangan hakim dalam mempercepat persidangan tindak pidana pencurian yang dilakukan Hendra dan Rio proses pembuktian dalam perkara itu mudah, yakni ;⁷

- a. Bahwa pada waktu persidangan itu semua subyek persidangan, mulai dari berkas perkara, Jaksa Penuntut, para terdakwa, alat bukti, saksi, dan juga majelis hakim telah ada dan siap untuk melaksanakan sidang.

⁷ Fathul Mujib, *Wawancara*, Ruang Hakim PN Gresik, 9 Januari 2012.

- b. Karena saat itu semua subyek persidangan sudah siap, maka kami (majelis hakim) tidak akan menunda apalagi menolak persidangan.
- c. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim adalah menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- d. Pada sidang tersebut memang ada salah satu terdakwa (Hendra Yusanto) sedang menderita penyakit HIV yang kronis, ada kekhawatiran jika nanti ada hal yang tidak diinginkan atas penyakit yang dideritanya⁸. Selain itu, pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang meringankan para terdakwa ;

- Para terdakwa terus terang atas perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil-kecil;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil barang curiannya ;
- Salah satu dari terdakwa sedang mengidap penyakit HIV yang kronis⁹.

Memperhatikan jalannya proses persidangan sesuai dalam Berita Acara Persidangan (BAP), memang nampak tidak ada kendala yang dialami dalam

⁸Bagian kepidanaan, *Wawancara*, Ruang Bagian Pidana PN Gresik, 9 Januari 2012.

⁹ Dalam putusan No : 526/Pid. B/2011/PN.Gs.

persidangan tersebut. Proses pembuktiannya tidak sulit, para terdakwa juga telah mengakui semua perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi kembali perbutannya. Di samping itu, yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim adalah karena salah satu terdakwa yakni Hendra Yusanto sedang mengidap HIV/AIDS akut, sehingga persidangan harus segera dilaksanakan dan segera diputuskan.

Berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang disebabkan karena terdakwa sedang mengidap HIV/AIDS akut. Selama ini penulis belum menemukan ketentuan dalam undang-undang maupun dalam peraturan lain yang membahasnya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali yang menerapkan Acara Pemeriksaan Cepat pada kasus tindak pidana memperjual-belikan minuman keras tanpa izin, berdasarkan penelitian dalam skripsi Mutiara Hirdes Delani¹⁰ dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pemeriksaan cepat adalah proses pembuktian kasusnya mudah dan tidak berbelit-belit seperti acara pemeriksaan biasa, selanjutnya jika (saksi, bukti, terdakwa, penyidik) semua sudah ada tinggal mencocokkan dengan alat bukti yang ada. Selain itu, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan ini adalah latar belakang kehidupan sosial keluarga terdakwa. Tidak ada hal yang janggal dalam putusan ini, karena kasus yang periksa cepat di sini adalah tindak pidana ringan.

¹⁰ Mutiara Hirdes Delani, *Tinjauan Yuridis Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Di Pengadilan Negeri Boyolali Studi Kasus Putusan No : 08/TPR/2010/PN-BI*, (Skripsi : Universitas Negeri Surakarta, 2011), iv.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk segera menyidangkan atau tidak menunda-nunda proses persidangannya kasus Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra adalah benar, namun dalam hal hakim menerapkan Acara Pemeriksaan Cepat pada perkara yang seharusnya diperiksa dengan Acara Pemeriksaa Biasa adalah tindakan yang tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan aturan. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 205 KUHAP, yang menyatakan bahwa yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat adalah tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan.

Jikalau pun adanya penyakit yang diderita terdakwa menjadi salah satu alasan hakim untuk meringankan, itupun seharusnya dari segi hukumannya bukan pada proses persidangannya. Karena di samping terdakwa Hendra Yusanto ada terdakwa lain yakni Rio Dwi Patra yang kondisi jasmani rohaninya normal tidak sedang sakit, juga ikut disidangkan dengan cepat dan ancaman hukumnyapun ringan yaitu 2 bulan dipotong masa penahan. Hal ini tentu jauh dari apa yang dituntutkan jaksa penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) bagian 4 dengan ancaman hukumnya adalah 7 tahun penjara.

**Analisis Hukum Islam Terhadap Percepatan Proses Persidangan Bagi
Terdakwa Pencurian Yang Mengidap HIV/AIDS**

Islam adalah agama *sama>wi* dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT.dalam wahyu-Nya Al-Qur'an, dan sejalan pula dengan tuntunan baginda *Rasu>lullahSAW*. dalam*Sunnahnya*. Adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim menempuh pola kehidupan yang Islamis, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Untuk itulah, setiap muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehatnya setiap langkah dan perilakunya, sehingga bisa memisahkan antara yang benar (*h}ala>l*) dan yang salah (*hara>m*).¹¹

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT.adalah sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan bagi umat manusia di dunia dan juga sebagai bekal di akhirat kelak.Di dalamnya (Al-Qur'an) terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati manusia, terdapat kabar gembira bagi yang mentaatinya, juga perintah untuk menghukum bagi yang melanggar ketentuannya tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin, kaya ataupun miskin.

Syari'at Islam memberikan tekanan besar pada prinsip “kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)”. Prinsip kesamaan di hadapan hukum ini tidak hanya terpampang dalam teori dan filosofi hukum Islam, akan tetapi secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para khalifah penerus beliau.¹²

viii. ¹¹ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1992),

¹²Topo Santoso, *Membumikan Syariat Islam*, (Sinar Grafika, 2004) , 17.

Tindak pidana pencurian yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Telah dikisahkan ; seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah untuk meminta pembebasan si wanita tadi dari hukuman yang dijatuhkan, maka Rasulullah dengan tegas perantaraan itu dengan menyatakan : “*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamtkannya dari hukuman h{ad}*”.¹³

Maka dari itu tidak ada yang diistimewakan di hadapan hukum Islam, setiap pelaku tindak pidana akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, yang dalam hukum disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban dalam *syari'at* Islam, adalah pembebanan seseorang dari hasil atau akibat perbuatan yang dikerjakannya kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.¹⁴

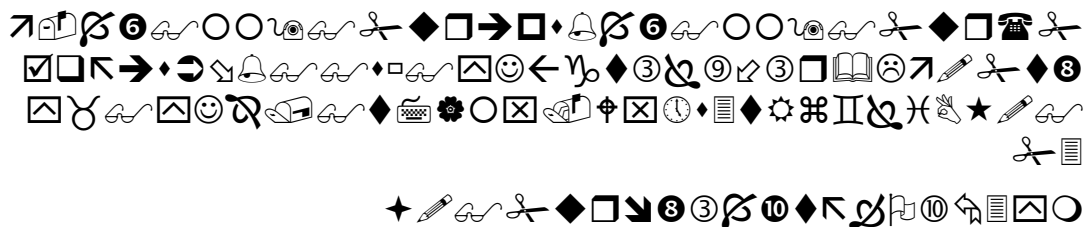
Dalam hukum Islam, pencurian atau *As-Sa>riqah* didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan *i't{ikad* tidak baik mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.¹⁵ *Jari>mah* pencurian dalam Islam telah dianggap lengkap (sempurna) apabila telah terdapat unsur-unsur yang ditentukan oleh para *Fuqaha'* sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di awal (bab 2).

¹³ *Ibid*, 18.

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 16.

¹⁵ Topo Santoso, *membumikan Syari'at Islam*, 28.

Pencurian dalam syariat Islam ancaman hukumannya ada dua macam yaitu ; pencurian yang ancaman hukumannya *h{ad* dan pencurian yang ancaman hukumannya *ta'zi>r*. Maka, sesuai ketentuan dalam syariat Islam hukuman bagi pencuri yang sudah memenuhi syarat adalah dipotong tangannya. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 38;¹⁶



“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Di sisi lain, pada tindak pidana pencurian yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan atas pengakuan dari terdakwa Hendra Yusanto; bahwa dirinya terpaksa melakukan perbuatan itu(mencuri) karena saat itu ia sedang sakit, maka dari itu ia membutuhkan uang untuk beli obat.

Dalam Islam, suatu kejahatan yang dilakukan karena ada unsur keterpaksaan tidak dikenakan hukuman. Demikian pula halnya bagi pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena

¹⁶ Depag, *Al-Qur'andanTerjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung, 2006), 151.

terpaksa (*d{aru>rah*) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 ;¹⁷



“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

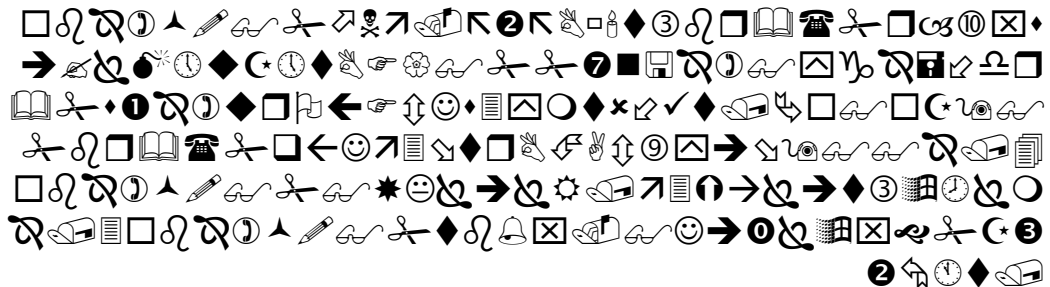
Menurut *ulama’Malikiyah*, darurat adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti maupun dalam perkiraan. Menurut *ulama’Syafi’iyah*, darurat adalah rasa khawatir akan terjadi kematian atau sakit yang menakutkan, atau semakin parahnya penyakit jika ia tidak makan, jika ia tidak mendapatkan yang halal, kala yang ada hanya yang haram. Namun demikian, ketentuandarurat ini ada batasan-batasan (*zawabit*), sehingga tidak semua orang bisa mengklaim adanya keadaan darurat, batasan-batasan tersebut adalah ;

1. kekhawatiran akan kebinasaan, hilangnya jiwa ataupun harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui dengan dugaan yang kuat berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi.
2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan yang lain kecuali melanggar perintah atau larangannya, atau tidak ada cara lain untuk menghindari *kemud{aratan* itu selain melanggar hukum.

¹⁷ Depag, *Al-Qur’andanTerjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung, 2006), 32.

3. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip *syara'* yang pokok, seperti memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah dan sebagainya.

Sehingga dalam konteks yang demikian ini, jika ditinjau dari perspektif agama, moral, pendidikan serta aspek sosial, maka apabila terjadi kejahatan tetap harus ditegakkan hukuman dan keadilan kepada pelakunya. Sebagaimana firman Allah:



*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adl Maha mdengar lagi Maha Melihat”.*¹⁸

Dalam Islam pencurian yang dilakukan karena ada unsur keterpaksaan akan terbebas dari *h{ad}*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, Islam sebagai agama *rah{matan lil'a>lami>n* maka hukuman kepada masyarakat tidak harus dikesampingkan. Hukuman tersebut adalah hukuman sebagai pelajaran yang di dalamnya terkandung sifat pembinaan dan bimbingan, yakni berupa hukuman *ta'zi>r*.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'andanTerjemahnya*, 113.

Ta'zi>r secara etimologis berarti menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologis dapat didefinisikan sebagai berikut :

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبُ بَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانَ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَ
تَقْدِيرَهَا لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ
الْقَاضِي الْمَجَاهِدِينَ

“*Ta'zi>r* adalah bentuk hukuman yang tidak ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri”.¹⁹

Dalam *ta'zi>r*, tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk dan kadar hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan atas keanekaragaman metode yang dipergunakan oleh Pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.²⁰

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada bab III (tiga), tentang percepatan persidangan bagi terdakwa tindak pidana pencurian dengan salah satu alasannya karena terdakwa mengidap HIV/AIDS, di samping juga memperhatikan landasan hukum yang dipakai Hakim dalam menyelesaikan kasus ini, maka jenis tindak pidana pencurian yang diputuskan di Pengadilan

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 141.

²⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, 14.

Negeri Gresik ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yakni tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (3) KUHP, yang ancaman hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun penjara, dan telah terpenuhi semua unsur-unsurnya.

Pandangan hukum Islam tentang tata cara proses dalam persidangan, pada prinsipnya apabila suatu gugatan telah dinilai benar untuk diputus, maka wajib bagi *qadfi* segera memutuskan dan tidak dibenarkan menunda persidangan. Kalau ditunda maka berdosa bahkan ia dapat dipecat, karena menunda-nunda persidangan tanpa ada sebab adalah menimbulkan *madharat* bagi manusia, menghambat kemaslahatan, dan menyia-nyiakan hak mereka.

Qadfi wajib menentramkan hati orang-orang yang takut dan mendahulukan orang-orang yang datang lebih dahulu, di samping itu harus memperhatikan yang datang dari jauh atau orang-orang yang sakit agar mereka didahulukan.²¹ Seyogyanya hakim memeriksa perkara menurut urutan masuknya perkara, dalam hal ini hakim boleh mendahulukan perkara-perkara orang perantauan dan orang-orang yang mempunyai *uzur*.

Makna menyegerakan atau mendahulukan persidangan di atas bukan berarti mempercepat dan memudahkan tahap-tahap dalam persidangan sehingga mengabaikan prinsip ketelitian dan kejelian persidangan, melainkan tidak menunda-nunda jalannya persidangan. Bahkan dikisahkan pada masa pemerintahan *Umar bin Khatab* telah terjadi telah terjadi kasus pembunuhan

²¹Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 71.

terhadap pemuda yang baru tumbuh kumisnya. Untuk mengungkap siapa pelakunya dalam kasus ini *Umar bin Khatab* mengalami kesulitan karena tidak ada informasi dan juga saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan. Kasus inipun sempat didiamkan dalam waktu relatif lama²² demi mengungkap pelakunya.

Al-qur'an mewajibkan penguasa untuk memotong tangan pencuri baik laki maupun perempuan. Namun demikian Rasulullah melarang hukuman potong tangan tangan pencuri yang mencuri dalam safar, harus ditunda sampai ke tempat tujuan.²³

²² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-khukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Adnan Qohar dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 46.

²³ Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), cet-5, 292,